

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam setahun tertentu. Di dalam suatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negara berkembang, barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain. Selalu didapati produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa ahir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah (Ambiyah, 2017)

Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni: usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata,

pengarahan pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna mengokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi dalam Ambiyah, 2017)

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2003)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GT = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

Di mana:

Gt : tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (persen)

Y_t : PDRB riil tahun t

Y_{t-1} : PDRB riil tahun sebelumnya

Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menilai keberhasilan atas pertumbuhan yang telah dilakukan di daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana tinggi rendahnya nilai PDRB daerah tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum.

Menurut Sukirno dalam Ambiyah (2017), PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 2017)

Menurut Sari (2018), faktor yang mempengaruhi PDRB di seluruh wilayah Indonesia yaitu penduduk bekerja. Peningkatan penduduk bekerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia. Menurut Todaro (2000), pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi.

Selain itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi menurut Rahman dalam dalam Ambiyah (2017), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pengeluaran pemerintah daerah, serta tenaga kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. dari data PDRB ini berguna untuk;

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.

- b. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- c. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah
- d. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.
- e. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Berikut definisi kunci Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah Domestik dan Regional

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan propinsi atau daerah kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi diwilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

b. Produk Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negara tersebut, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dalam ke luar negara) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

c. Produk Regional

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negera dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negera. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

d. Residen dan Non-Residen

Unit institusi yang mencakup penduduk atau rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit, dikatakan sebagai residen bila mempunyai atau melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non-profit tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun).

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan) penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar.

f. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di

dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh produk domestik regional neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

g. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik

Regional Neto (PDRN) atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor.

h. Pendapatan Regional

Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah. produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Kalau produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan produk regional neto yaitu merupakan jumlah

pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk regional neto inilah yang merupakan pendapatan regional.

i. Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita (Badan Pusat Statistik, 2018).

2. Kredit Untuk Modal Kerja

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan nilainya dapat diukur dengan uang, misalnya bank membiaya kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama.

Fungsi-fungsi kredit dalam garis besar besarnya adalah kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang, kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi, kredit menimbulkan

kegairahan berusaha masyarakat, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Kredit untuk modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya, kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/bank ditambah dengan persediaan, baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.

Menurut Salma (2013) kredit modal kerja adalah suatu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kriteria dan modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam suatu siklus usaha, hal ini dapat dilihat dari neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/bank ditambah dengan piutang dagang. Dan apabila yang dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.

Kredit modal kerja diberikan oleh pihak, baik kepada debitur untuk pembiayaan berbagai pembiayaan sektor perekonomian antara sektor perdagangan, industri, perkebunan, koperasi dll. Secara lebih spesifik bentuk kredit modal kerja dapat terbagi dalam beberapa sektor yang antara lain adalah;

- a. Sektor perdagangan terdiri dari:
 - 1) Kredit leveransir
 - 2) Kredit ekspor
 - 3) Kredit untuk pertokoan
- b. Sektor industri antara lain :
 - 1) Kredit modal kerja pabrik makanan
 - 2) Kredit modal kerja tekstil
 - 3) Kredit modal kerja minuman
- c. Sektor perkebunan antara lain :
 - 1) Kredit pembelian pupuk
 - 2) Kredit pembelian obat – abatan anti hama, dll

Modal kerja menunjukkan sejumlah dana yang tertanam atau terikat pada aktiva lancar yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Kredit modal kerja (KMK) juga merupakan fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan (misalnya perusahaan jasa transportasi, perhotelan, rumah makan dan sebagainya) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Langkah pemerintah untuk memacu investasi antara lain adalah dengan mengkondisikan aksesibilitas pendanaan investasi bagi dunia usaha. Pemerataan mendapatkan akses perbankan yang mudah akan mempertinggi penyaluran kredit investasi (investment credit) dan kredit modal kerja

(working capital credit). Kedua kredit tersebut merupakan kredit jangka panjang dan kredit jangka pendek untuk menambah stok barang modal termasuk mesin-mesin, peralatan, tanah dan persediaan. Oleh karena itu pengkondisian pemerataan dan kemudahan akses perbankan merupakan hal yang penting, yang berupa kemudahan ijin usaha, kemudahan mendapatkan lokasi, kemudahan promosi/marketing dan kemudahan yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

Usaha pemerintah agar penyerapan kredit untuk modal ke masyarakat terdistribusi merata telah dilakukan melalui berbagai kebijakan pendukung guna akhirnya akan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walaupun secara empiris hubungan kausalitas antara perkembangan kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak ditunjukkan oleh peneliti memberikan dampak positif namun disisi lain banyak studi juga menyatakan bahwa kredit untuk modal tidak selalu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung kualitas infrastruktur.

3. Angkatan Kerja

Penduduk merupakan unsur penting dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk yang besar berperan dalam menyediakan tenaga kerja produktif yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi.

Angkatan kerja adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur sedang mencari pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2017)

Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu mempunyai kegiatan yaitu, yang pertama adalah bersekolah yaitu mereka yang kegiatan utamanya adalah sekolah. kedua mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatan utamanya hanya mengurus rumah tangga atau membantu tanpa mendapatkan upah. Ketiga, penerima pendapatan seperti mereka yang tidak melakukan sesuatu kegiatan tapi memperoleh penghasilan misalnya pensiunan, bunga simpanan dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti orang yang sudah lanjut usia, cacat jasmani atau lain sebagainya.

Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat rata-rata yang semakin baik, member dampak positif terhadap produktivitas angkatan kerja. Begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan pelatihan angkatan kerja yang disertai

dengan penerapan teknologi yang sesuai, berdampak pula terhadap peningkatan produktivitas angkatan kerja.

Dalam penelitian ini, angkatan kerja yang digunakan adalah angkatan kerja yang bekerja yang didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun keatas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

4. Belanja Modal (BM)

Dana yang diperoleh pemerintah daerah secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah. Menurut Rahman dkk., (2015), Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Namun setelah diterapkan sistem anggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tak terduga.

Sedangkan belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang meningkatkan produktifitas. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, maka diharapkan akan memacu pertumbuhan daerah.

Secara teoritis, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow kedalam tiga tahap. Ketiga tahap tersebut antara lain tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah yang tercermin dalam pengeluarannya terhadap total investasi besar karena pemerintah perlu menyediakan prasarana pendukung seperti transportasi, pendidikan dan sebagainya. Kemudian pada tahap menengah, peran investasi swasta semakin besar sehingga proporsi investasi pemerintah mulai berkurang. Walaupun demikian pada tahap ini, peran investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Pada tahap lanjut, investasi pemerintah berupa penyediaan barang publik melonjak drastis karena timbul kegagalan akibat peran investasi swasta yang tidak terkendali.

Jenis belanja yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja modal yang merupakan bagian dari belanja langsung dan didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan/ pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun pembentukan asset dalam belanja modal ini meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/ kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan / ternak dan tanaman serta persenjataan/ keamanan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumbe-sumber penerimaan daerah yang akan dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindak lanjuti pelaksanaannya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan publik dan pembangunan daerah tingkat II, pendapatan asli daerah memang cukup penting dimana pendapatan asli daerah tingkat II secara bertahap dapat terus ditingkatkan sehingga semakin mampu membiayai kebutuhannya sendiri, terlebih dalam situasi terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana subsidi dan bantuan kepada daerah. Namun demikian dalam menggali dan pendapatan asli daerah pemerintah daerah tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari pungutan-pungutan yang sifatnya memberatkan rakyat kecil. Berikut adalah klasifikasi pendapatan asli daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kedaerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2), jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari;

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian
- 7) Pajak Karir

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1) Bersifat pajak dan bukan Retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat
- 5) Potensinya memadai
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan

8) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau bersama. Adapun jenis retribusi daerah menurut UU No. 33 Tahun 2000 Pasal 12, yang dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus lebih fokus pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi.

c. Pendapatan lain-lain yang sah

Merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertu.

B. Hubungan antar variabel

1. Hubungan Kredit Untuk Modal Kerja Dengan PDRB

Untuk mencapai kondisi prekonomian PDRB yang tinggi, diperlukan sumber pembiayaan yang akan membiayai proses pembangunan, baik dipusat maupun di daerah. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah perbankan. Keberadaan bank atau perbankan yang sehat merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan akan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang umumnya digunakan untuk membantu proses produksi output (modal usaha), investasi dan konsumsi. Semakin besar nilai kredit yang disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan PDRB di daerah tersebut karena adanya proses produksi barang dan jasa yang baik akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan penduduk (Widya, 2012).

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai sementara kegiatan operasional rutin perusahaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Struktur permodalan yang bersumber dari kredit perbankan baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi menjadi sangat penting bagi perkembangan usaha-usaha seperti UMKM sehingga hal ini akan berdampak terhadap peningkatan PDRB suatu daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan kredit untuk modal kerja akan berpengaruh terhadap PDRB, karena dengan dilakukannya kredit

untuk modal kerja akan memperluas usaha dan akan meningkatkan permintaan agregat pada ekonomi daerah maupun nasional serta meningkatkan kesempatan kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan Angkatan Kerja Dengan PDRB

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan system perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut (Todaro dan Smith, dalam Novianto, 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB adalah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia (Lina, 2018).

3. Hubungan Belanja Modal (BM) Dengan PDRB

Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja modal fisik (*public physical*

capital) dan belanja modal manusia (*public human capital*) mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan koefisien untuk belanja modal fisik lebih besar daripada belanja modal manusia. Belanja pemerintah daerah yang produktif dapat meningkatkan rasio output terhadap modal (*the ratio of output to capital*), sedangkan belanja pemerintah yang tidak produktif dapat mengurangi rasio output terhadap modal (Guo dkk. dalam Rahman, 2014)

Salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand/AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan AD berarti terjadi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB maka peningkatan PDRB berarti peningkatan pendapatan (Kusumaningsih, 2012).

Kesejahteraan masyarakat yang tinggi akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga naik. Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, maka peningkatan pajak berarti peningkatan pengeluaran pemerintah. Keadaan ini membuat suatu siklus yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kenaikan pengeluaran

pemerintah akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi PDRB dan kenaikan PDRB akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan keuangan pemerintah untuk membiayai pembangunan, baik dipusat maupun daerah (Kusumaningsih, 2012).

4. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan PDRB

Menurut Ambiyah (2017), dalam kebijakan desentralisasi fiskal, salah satu tujuan utama ialah untuk menciptakan suatu kemandirian daerah dalam mendorong pembangunan ekonominya dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat (UU No. 32 tahun 2004). Dalam hal ini berarti pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut, terkhusus melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apabila PAD mengalami peningkatan yang cukup besar maka ini akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh daerah juga akan semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa akan meningkatkan kemandirian suatu daerah sehingga ini akan membuat daerah semakin berinisiatif dalam menggali potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Pertiwi dalam Ambiyah, 2017).

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada

pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi (Rori dkk., 2016).

Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai disuatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Rahman dkk., 2014).

Dalam penelitian Sari (2018), yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di seluruh wilayah Indonesia tahun 2010-2011. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan variabel dengan menggunakan variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA dan penduduk bekerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif

terhadap PDRB di seluruh wilayah Indonesia. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak signifikan terhadap PDRB di seluruh wilayah Indonesia tahun 2010-2011. Artinya jika semakin banyak angkatan kerja yang bekerja maka akan meningkatkan PDRB ketika angkatan kerja meningkat maka juga akan mengurangi pengangguran, seiring dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat maka berpengaruh juga terhadap produksi barang dan jasa sehingga hal ini berpengaruh terhadap PDRB. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap PDRB ketika PAD meningkat maka PDRB juga meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah seperti pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah seiring dengan peningkatan PAD maka belanja pemerintah juga ikut meningkat yang bertujuan untuk pembangunan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan di provinsi Aceh oleh Faizah dkk. (2014), yang berjudul pengaruh jumlah tenaga kerja, ekspor, investasi dan kredit perbankan terhadap PDRB terhadap sektor pertanian provinsi Aceh. Analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS), dengan memperoleh hasil penelitian, ekspor, investasi dan kredit perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sektor pertanian provinsi Aceh sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB sektor pertanian provinsi Aceh. Ketika tenaga kerja meningkat maka PDRB menurun, pada kondisi normal terdapat teori ekonomi klasik yang berlaku dimana penambahan jumlah angkatan kerja dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah tersebut.

Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi mengingat banyaknya fenomena-fenomena yang terbalik dari keadaan normal. Artinya banyaknya jumlah tenaga tidak sebanding dengan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja di provinsi aceh tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Penelitian yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi PDRB di sektor transportasi provinsi Lampung tahun 1998-2012. Dalam penelitian Direja (2017), dengan menggunakan analisis Ordinary Least Square (OLS), dengan hasil penelitian variabel jumlah penduduk, panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap PDRB sektor transportasi di provinsi lampug. Artinya jika jumlah penduduk naik maka PDRB juga naik, penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjutnya akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja.

Selanjutnya penelitian lain yang membahas tentang perkembangan PDRB daerah adalah yang dilakukan oleh Hayet (2016), yang berjudul analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi pada perbankan umum syariah terhadap pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat periode 2009-2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan hasil

variabel pembiayaan modal kerja secara individu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat deangkan variabel investasi dan konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDRB provinsi Kalimantan Barat. Ketika pembiayaan untuk modal kerja bertambah maka pertumbuhan PDRB turun artinya pembiayaan kredit modal kerja tidak begitu efektif digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB hal ini dikarenakan pembiayaan modal kerja kepada sektor industri belum mampu mendorong peningkatan produksi yang signifikan dan sumbangan laju pertumbuhan PDRB.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2015), yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Padang Pariaman periode 2004-2013. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan variabel investasi, tenaga kerja (upah) dan pengeluaran pemerintah (pembangunan). Hasil penelitian ini memperoleh variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB sedangkan variabel investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten Padang Pariaman. Ketika tenaga kerja (upah) naik maka PDRB juga naik artinya jumlah upah yang diberikan akan berdampak terhadap PDRB dan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah (pembangunan) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan maka tidak akan berpengaruh terhadap PDRB yang menyebabkan hal ini terjadi adalah pengeluaran pemerintah untuk pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Samsuri (2016), meneliti tentang analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Sumatra. Analisis yang digunakan adalah data panel, variabel yang digunakan adalah belanja modal dan belanja oprasional. Dengan memperoleh hasil belanja modal dan belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Sumatra. Ketika belanja modal meningkat maka PDRB juga meningkat artinya belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah sangat efektif untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB, belanja modal yang dilakukan pemerintah difokuskan untuk pembangunan ekonomi sehingga belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB Sumatra.

Penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB era desentralisasi fiskal diprovinsi Banten periode 2001-2009. Dalam penelitian Nasution, (2010) dengan menggunakan alat analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan hasil penelitian Variabel inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB era desentralisasi fiskal di provinsi Banten periode 2001-2009 dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB era desentralisasi fiskal diprovinsi banten periode 2001-2009. Ketika PAD meningkat maka pertumbuhan PDRB juga ikut meningkat artinya keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak diukur dari jumlah yang diterima tetapi, juga diukur dari peranannya untuk mengatur perekonomian masyarakat. Pengeluaran

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan artinya ketika pengeluaran pemerintah meningkat maka PDRB juga ikut meningkat hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah sepenuhnya digunakan untuk kegiatan ekonomi atau yang memberikan dorongan bagi perkembangan kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah tenaga kerja ketika tenaga kerja mengalami kenaikan maka PDRB juga ikut mengalami kenaikan.

Penelitian mengenai perkembangan PDRB di provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Kusumaningsih (2012), yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konisis PDRB kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan alat analisis Ordinary Least Square (OLS), dengan hasil penelitian variabel kredit dan belanja modal signifikan terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah, dan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), tabungan dan kepadatan penduduk tidak signifikan terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah. Ketika belanja modal naik maka PDRB juga ikut naik, belanja modal merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat, berarti jika pemerintah meningkatkan belanja daerah maka permintaanya juga meningkat. Permintaan yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan penawaran sehingga pendapatan pemerintah naik dan pada ahirnya pertumbuhan ekonomi PDRB daerah juga naik. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB jawa tengah, artinya ketika PAD naik maka PDRB tidak ikut naik hal ini dikarenakan pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak dilakukan dengan baiksesuai standar teori desentralisasi fiskal atau terjadi korupsiyang tiinggi sehingga mengakibatkan realisasi sumberdana PAD berkurang maka peningkatan nilai PAD tidak dapat mendorong prekonomian.

Kepadatan penduduk tidak signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah artinya ketika kepadatan penduduk naik maka PDRB tidak ikut naik ketika jumlah penduduk naik maka jumlah pengangguran juga ikut naik karena pertumbuhan penduduk adalah sumber utama meningkatnya jumlah kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2018), analisis pengaruh investasi, belanja modal, angkatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2007-2016. Alat analisis yang digunakan adalah data panel. Dengan memperoleh hasil penelitian variabel investasi, belanja modal, angkatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Bruto (PDRB) di DIY. Ketika belanja modal naik maka PDRB juga ikut naik begtu juga sebaliknya artinya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah DIY sangat berperan pada sektor prekonomian sehingga hal ini berpengaruh terhadap PDRB. Sedangkan variabel angkatan kerja sama halnya dengan variabel belanja modal karena sangat berperan penting terhadap PDRB DIY artinya ketika angkatan kerja naik maka PDRB juga naik hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya lapangan pekerjaan di daerah tersebut sehingga terjadi sedikit pengangguran. PAD sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB artinya penerimaan daerah dari sektor pariwisata sangat berperan terhadap PDRB hal ini dikarenakan sektor pariwisata dikelola dengan baik sehingga berdampak terhadap prekonomian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk., (2014) dengan judul penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan angkatan kerja terhadap PDRB perkabupaten/kota di provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur path analysis, dengan memperoleh hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkabupaten/kota di provinsi Bali. Ketika PAD naik maka PDRB juga ikut naik begitujuga sebaliknya artinya suatu daerah dapat menunjukkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi daerah berdasarkan otonomi daerah yang ada. Dalam penelitian ini belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ketika belanja modal naik PDRB juga naik, tingginya belanja daerah disebabkan oleh tingginya PAD daerah yang menyebabkan daerah tersebut menambah aset untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Sedangkan variabel angkatan kerja juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB ketika angkatan kerja meningkat maka PDRB juga meningkat, peningkatan jumlah angkatan kerja akan menambah output barang dan jasa oleh karena itu pemerintah daerah akan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skil yang mereka miliki sehingga hal ini akan meningkatkan pertumbuhan PDRB maupun ekonomi.

Untuk memperjelas lebih detail penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat di tabel dibawah ini

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (tahun)	Tempat Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
1.	Sari (2018)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di seluruh wilayah Indonesia tahun 2010-2011	Data Panel	– Variabel penduduk bekerja, angka partisipasi sekolah SMA, angka partisipasi sekolah perguruan tinggi berpengaruh signifikan. – Variabel PMA, PMDN, PAD dan DAU tidak signifikan.
2.	Faizah dkk. (2014)	Pengaruh jumlah tenaga kerja, ekspor, investasi dan kredit perbankan terhadap PDRB terhadap sektor pertanian provinsi Aceh	OLS (Ordinary Least Square)	– Semua variabel yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan.
3.	Direja (2017)	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi PDRB di sektor transportasi provinsi Lampung tahun 1998-2012	OLS (Ordinary Least Square)	– Variabel jumlah penduduk, panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi Lampung
4.	Hayet (2016)	Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi pada perbankan umum syariah terhadap	Linier Berganda	– Variabel pembiayaan modal kerja secara individual tidak berpengaruh signifikan. – variabel investasi

No	Penulis (tahun)	Tempat Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
		pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat periode 2009-2013		dan konsumsi berpengaruh positif dan signifikan.
5.	Fauziah (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten Padang Pariaman periode 2004-2013	Linier Berganda	–variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB –Pengeluaran pemerintah (pembangunan) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB
6.	Samsuri (2016)	Analisis analisis pengaruh belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Sumatra	Data Panel	–Belanja modal dan belanja oprasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB
7.	Nasution (2010)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB era desentralisasi fiskal diprovinsi banten periode 2001-2009	OLS (Ordinary Least Square)	–Variabel PAD, DAU, DBH, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB –Variabel PMA dan PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB
8.	Kusumaningsih (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konisis PDRB Kabupaten/Kota di	OLS (Ordinary Least Square)	–Variabel kredit dan belanja modal berpengaruh positif dan

No	Penulis (tahun)	Tempat Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
		Provinsi Jawa Tengah		signifikan. –Variabel PAD, tabungan dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
9.	Ramadhani (2018)	Analisis pengaruh investasi, belanja modal, angkatan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2007-2016	Data Panel	–Variabel investasi, belanja modal, angkatan kerja dan PAD sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB
10.	Lestari (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan angkatan kerja terhadap PDRB perkabupaten/kota di provinsi Bali	Path Analysis	–Variabel investasi, PAD dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara mengenai pengaruh variabel-variabel dependen dan independen berdasarkan kerangka teoritis maupun penelitian terdahulu. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Diduga Kredit Untuk Modal Kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi NTB tahun 2011-2016.
2. Diduga angkatan kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi NTB tahun 2011-2016.
3. Diduga Belanja Modal (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi NTB tahun 2011-2016.
4. Diduga Pendapatan Asli Daerah (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi NTB tahun 2011-2016.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

